



Model Orkestrasi Kolaboratif Dalam Pengelolaan Event-Based Hidden Curriculum Untuk Penciptaan Nilai Publik Moderasi Beragama

Irpan Ilmi

Irpanilm1@gmail.com

Institut Nasional Nusantara Al Farabi

¹Correspondence Email Irpanilm1@gmail.com ¹

Received: 01/05/2026	Accepted: 12/06/2026	Published: 30/06/2026
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Abstract

This study examines the role of religious events as a strategic medium for internalizing religious moderation within the Ministry of Religious Affairs (Kemenag). Using a qualitative descriptive approach, the study explores how the Hari Amal Bakti (HAB) serves as an event-based hidden curriculum. Data were collected through documentation and content analysis of activities at the Kemenag office in Pangandaran, including the launch of the HAB 80th anniversary and milestone commemorations at MAN 1 Pangandaran. The findings indicate that religious events are not merely ceremonial but function as an arena for social learning. Through the orchestration of religious moderation, Penmad and PAKIS sectors successfully bridge institutional mandates to produce public value outcomes. The research concludes that strategic event management, when aligned with institutional legitimacy and collaborative capacity, effectively normalizes moderate religious values among students, teachers, and the broader community, moving beyond formal curriculum constraints.

Keywords: *Religious Moderation; Event-Based Hidden Curriculum; Strategic Management; Public Value; Collaborative Governance.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran acara keagamaan sebagai media strategis untuk menginternalisasikan moderasi beragama di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Hari Amal Bakti (HAB) berfungsi sebagai event-based hidden curriculum. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan analisis konten terhadap aktivitas di kantor Kemenag Kabupaten Pangandaran, termasuk peluncuran rangkaian HAB ke-80 dan peringatan milad di MAN 1 Pangandaran. Temuan menunjukkan bahwa acara keagamaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berfungsi sebagai arena pembelajaran sosial. Melalui orkestrasi moderasi beragama, seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) berhasil menjembatani mandat institusional untuk menghasilkan luaran nilai publik (public value outcomes). Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen acara strategis, ketika diselenggarakan dengan legitimasi institusional dan kapasitas kolaboratif, mampu menormalkan nilai-nilai agama yang moderat secara efektif di kalangan siswa, guru, dan masyarakat luas, melampaui batasan kurikulum formal.

Kata Kunci: Moderasi Beragama; Event-Based Hidden Curriculum; Manajemen Strategis; Nilai Publik; Tata Kelola Kolaboratif.

A. Introduction

Fenomena penyelenggaraan acara keagamaan berskala besar (religious mega-events) telah lama menjadi perhatian dalam kajian manajemen, sosiologi agama, dan kebijakan publik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa acara keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai ritual kolektif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan nilai, identitas, dan kohesi sosial (Rani, N., Nurlita, S., & Hallimatusadiah, S. (2025)). Namun demikian, sebagian besar kajian terdahulu masih menempatkan keberhasilan acara keagamaan pada aspek teknis-manajerial seperti logistik, keamanan, partisipasi, dan dampak ekonomi, sebagaimana terlihat dalam studi komprehensif tentang World Youth Day (WYD) oleh Godinho (2024). Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan mega-event keagamaan sangat bergantung pada kapasitas operasional, manajemen relawan, keamanan, teknologi, dan koordinasi pemangku kepentingan, tetapi belum secara eksplisit mengkaji acara sebagai mekanisme internalisasi nilai jangka panjang atau sebagai kurikulum tersembunyi (hidden curriculum).

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi semakin relevan ketika moderasi beragama ditetapkan sebagai agenda strategis nasional dan menjadi core values Kementerian Agama. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama sering kali berhenti pada tataran normatif dan simbolik, serta belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pendidikan dan kegiatan keagamaan sehari-hari (Ilmi, 2025). Kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh birokrasi, termasuk peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama, kerap dipersepsikan sebagai agenda seremonial tahunan yang miskin refleksi pedagogis dan lemah daya transformasinya. Padahal, kegiatan tersebut melibatkan ribuan guru, siswa, dan tokoh masyarakat lintas satuan pendidikan, sehingga memiliki potensi besar sebagai wahana pengendalian nilai (value control) dan internalisasi moderasi beragama secara masif.

Artikel Ilmi (2023) secara kritis menunjukkan bahwa praktik pendidikan keagamaan, baik di madrasah maupun sekolah umum, masih menghadapi problem fragmentasi nilai dan minimnya orkestrasi lintas unit kerja. Moderasi beragama sering dipahami secara sektoral dan dibebankan pada unit tertentu, tanpa adanya desain manajerial terpadu yang mampu menjembatani ruang formal, nonformal, dan

ruang publik. Temuan ini sejalan dengan kritik dalam literatur mega-event keagamaan internasional yang menegaskan bahwa tanpa kerangka nilai yang jelas, acara besar berisiko menjadi "high-cost, low-impact events" dalam jangka panjang (Cerutti & Piva, 2015; Verma et al., 2021).

Kritik tersebut diperkuat oleh penelitian *Developing a Model for Optimizing Religious and Cultural Events* yang menekankan pentingnya model pengelolaan acara berbasis tujuan nilai (value-oriented event management). Studi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi acara keagamaan menuntut kejelasan tujuan normatif, integrasi antar-aktor, serta mekanisme evaluasi berbasis dampak sosial, bukan sekadar keberhasilan teknis. Tanpa desain model yang terstruktur, acara keagamaan cenderung terjebak pada rutinitas simbolik dan kehilangan daya pengaruhnya terhadap pembentukan sikap dan perilaku peserta.

Dalam struktur Kementerian Agama di tingkat daerah, Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) dan Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) memegang peran strategis namun berbeda. Penmad bertanggung jawab atas internalisasi nilai moderasi beragama di lingkungan pendidikan formal madrasah, dengan karakter birokrasi yang relatif homogen dan terikat kurikulum. Sementara itu, PAKIS mengelola guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum serta lembaga pendidikan keagamaan nonformal seperti MDT dan TPQ, yang memiliki spektrum sosial, budaya, dan ideologis yang lebih beragam. Perbedaan karakter ini menuntut strategi manajerial yang tidak seragam, terutama ketika keduanya harus berkolaborasi dalam penyelenggaraan acara besar seperti HAB agar tidak sekadar menjadi ritus kelembagaan, melainkan instrumen pendidikan nilai lintas ekosistem.

Sayangnya, kajian-kajian terdahulu—baik yang membahas mega-event keagamaan internasional seperti WYD (Godinho, 2024) maupun studi moderasi beragama di Indonesia (Ilmi, 2023)—belum secara spesifik menempatkan acara keagamaan birokratis sebagai hidden curriculum yang dikelola secara strategis oleh aktor negara. Belum ditemukan penelitian yang membedah bagaimana dua unit kerja internal Kementerian Agama dengan mandat berbeda mengorkestrasi satu agenda acara yang sama untuk menghasilkan nilai publik (public value) berupa penguatan moderasi beragama.

Berangkat dari celah penelitian tersebut, studi ini memosisikan acara keagamaan berbasis institusi negara sebagai arena strategis produksi nilai publik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian tentang *Promoting Indonesian Religious Moderation* yang menegaskan bahwa moderasi beragama Indonesia tidak hanya diproyeksikan untuk konsumsi domestik, tetapi juga sebagai narasi publik dan *soft power* di tingkat nasional maupun global. Studi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan promosi moderasi beragama sangat ditentukan oleh konsistensi praktik institusional, keteladanan aktor negara, serta integrasi nilai moderasi ke dalam aktivitas rutin dan simbolik lembaga publik, bukan semata melalui wacana kebijakan atau diplomasi formal.

Dalam konteks ini, acara keagamaan birokratis seperti HAB dapat dipahami sebagai medium strategis yang menjembatani dimensi internal (pembinaan guru dan siswa) dan eksternal (citra moderasi beragama Kementerian Agama di ruang publik). Argumen ini diperkuat oleh penelitian tentang *Diseminasi Informasi Moderasi Beragama* yang menegaskan bahwa keberhasilan moderasi beragama sangat bergantung pada strategi komunikasi institusional, konsistensi pesan, serta pemilihan medium yang memiliki daya jangkauan luas dan legitimasi simbolik. Studi tersebut menunjukkan bahwa diseminasi moderasi beragama yang bersifat satu arah, administratif, dan berbasis dokumen kebijakan cenderung kurang efektif dalam membentuk sikap publik.

Dalam kerangka tersebut, acara keagamaan publik—yang melibatkan simbol negara, ritus keagamaan, serta partisipasi kolektif—memiliki keunggulan sebagai medium diseminasi nilai yang bersifat experiential dan performatif. Melalui keterlibatan langsung guru, siswa, dan masyarakat, nilai

moderasi tidak hanya dikomunikasikan, tetapi dipraktikkan dan dinormalisasi. Dengan menggunakan pendekatan Public Value Management (Moore, 1995), penelitian ini memandang moderasi beragama sebagai *public value outcomes* yang hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara *authorising environment* (legitimasi kebijakan dan mandat institusional) dan *operational capacity* (kapasitas kolaboratif Penmad dan PAKIS dalam mengelola acara). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas kajian tentang moderasi beragama, tetapi juga menawarkan perspektif baru bahwa *event-based hidden curriculum* merupakan instrumen kebijakan publik yang strategis dalam tata kelola pendidikan keagamaan.

B. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses, makna, serta dinamika pengelolaan acara keagamaan sebagai *hidden curriculum* moderasi beragama dalam konteks kelembagaan Kementerian Agama. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif menekankan pada eksplorasi fenomena sosial yang kompleks melalui pengumpulan data naturalistik dan analisis interpretatif terhadap perspektif para aktor yang terlibat.

Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual bagaimana Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) dan Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) merencanakan, melaksanakan, dan memaknai kegiatan keagamaan berbasis acara—khususnya rangkaian Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 dan milad lembaga di MAN 1 Pangandaran—sebagai instrumen internalisasi nilai moderasi beragama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menangkap perbedaan strategi, orientasi nilai, serta bentuk kolaborasi lintas seksi tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelusuran mendalam terhadap praktik penyelenggaraan kegiatan keagamaan, termasuk pola interaksi kelembagaan, bentuk partisipasi aktor pendidikan, serta simbol dan pesan nilai yang dihadirkan dalam acara. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis teks digital, meliputi laporan kegiatan, berita resmi dari portal Kemenag Pangandaran, publikasi dan dokumentasi visual pada akun Instagram resmi @kemenag_pangandaran, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan program moderasi beragama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah teks (*document analysis*) terhadap materi kegiatan, narasi sambutan, foto, video, serta laporan resmi kegiatan Penmad dan PAKIS. Teknik ini sejalan dengan pandangan Creswell (2014) bahwa dokumen merupakan sumber data penting dalam penelitian kualitatif karena merepresentasikan praktik sosial dan kebijakan yang telah dilembagakan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan strategi manajemen acara, bentuk *hidden curriculum*, dan pola kolaborasi lintas seksi. Selanjutnya, data diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka konseptual moderasi beragama dan penciptaan nilai publik (*public value*). Keabsahan data dijaga melalui ketekunan pengamatan, triangulasi sumber data digital, dan konsistensi penafsiran.

C. Results and Discussion

1. Results

Hasil penelusuran dokumen, berita resmi, dan arsip digital pada laman serta media sosial Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa acara keagamaan, khususnya Hari Amal Bakti (HAB) ke-80, diselenggarakan melalui rangkaian kegiatan yang terstruktur, masif, dan melibatkan berbagai unit kerja internal serta pemangku kepentingan eksternal. Kegiatan tersebut diawali dengan rapat persiapan terpadu, *launching* rangkaian acara di MAN 1 Pangandaran, hingga refleksi kinerja dan prestasi instansi di tahun 2025. Rangkaian acara meliputi kompetisi seni dan olahraga, gerak jalan kerukunan, pembinaan guru, forum lintas agama, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Dalam praktiknya, Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad) berperan dominan dalam pengelolaan teknis dan koordinasi kegiatan yang melibatkan madrasah formal, guru, dan peserta didik. Sementara itu, Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) lebih banyak terlibat dalam kegiatan pembinaan guru PAI, penguatan moderasi beragama di sekolah umum, serta interaksi dengan masyarakat dan tokoh lintas agama. Pola ini menunjukkan adanya diferensiasi peran berdasarkan mandat kelembagaan masing-masing seksi yang diorkestrasi secara kolektif di bawah kepemimpinan kantor Kementerian Agama.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai moderasi beragama disisipkan secara implisit melalui simbol, ritus, dan praktik sosial dalam rangkaian acara. Disiplin birokrasi, loyalitas institusional, kerja sama lintas satuan pendidikan, serta interaksi lintas agama menjadi pengalaman kolektif yang dialami peserta tanpa disampaikan secara eksplisit sebagai materi ajar formal. Dengan demikian, acara keagamaan berfungsi sebagai *event-based hidden curriculum* yang membentuk sikap dan orientasi nilai peserta secara transformatif.

2. Discussion

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa acara keagamaan birokratis seperti rangkaian Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 di Kemenag Pangandaran tidak sekadar berfungsi sebagai ritual seremonial tahunan, melainkan sebagai instrumen strategis internalisasi nilai moderasi beragama melalui mekanisme *hidden curriculum* berbasis acara (*event-based hidden curriculum*). Dalam perspektif teoretis, temuan ini dapat dijelaskan melalui tiga kerangka utama: *Public Value Management* (Moore, 1995), *collaborative governance*, dan teori *hidden curriculum* dalam pendidikan keagamaan.

Public Value Triangle sebagai Kerangka Analisis

Mark Moore (1995) mengembangkan *strategic triangle* sebagai kerangka bagi manajer publik untuk merancang kebijakan yang selaras dengan kebutuhan publik. Segitiga strategis ini mencakup tiga elemen penting: *public value outcomes*, *authorising environment*, dan *operational capacity*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama yang diinternalisasikan melalui acara HAB dapat dipahami sebagai *public value outcomes*—nilai publik yang dihasilkan bukan hanya untuk kepentingan internal Kementerian Agama, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui keterlibatan publik dalam kegiatan keagamaan.

Authorising environment dalam konteks ini tercermin dari legitimasi kebijakan yang kuat dari pimpinan dan regulasi Kementerian Agama terkait moderasi beragama. Sebagaimana diungkapkan dalam kebijakan strategis nasional, penguatan moderasi beragama merupakan program prioritas Kemenag yang bertujuan memperkuat pemahaman dan praktik beragama yang moderat di tengah masyarakat multikultural. Dukungan struktural ini memungkinkan Penmad dan PAKIS mengintegrasikan agenda moderasi beragama ke dalam kegiatan rutin dan

simbolik lembaga. Tanpa legitimasi ini, acara keagamaan berpotensi berhenti pada aktivitas seremonial tanpa orientasi nilai yang jelas.

Operational capacity diwujudkan melalui kolaborasi antara Penmad dan PAKIS yang memiliki karakter dan mandat kelembagaan berbeda. Penmad memiliki kekuatan pada pengelolaan birokrasi pendidikan formal dan konsolidasi internal, sedangkan PAKIS unggul dalam menjangkau ruang publik dan komunitas yang beragam. Perbedaan karakter ini justru memperkuat kapasitas operasional Kemenag Pangandaran dalam mengelola acara keagamaan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian tentang transformasi kelembagaan Kemenag yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola yang transparan, partisipatif, dan kolaboratif.

Collaborative Governance dalam Orkestrasi Acara Keagamaan

Kolaborasi antara Penmad dan PAKIS dalam penyelenggaraan HAB mencerminkan model *collaborative governance* internal Kementerian Agama. Penelitian tentang tata kelola kolaboratif dalam konteks keagamaan menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, merupakan kunci keberhasilan penguatan moderasi beragama. Dalam konteks ini, Kemenag Pangandaran berhasil mengorkestrasi dua unit kerja dengan mandat berbeda untuk menghasilkan nilai publik berupa penguatan moderasi beragama.

Temuan ini sejalan dengan studi tentang *religious governance* yang menegaskan bahwa transformasi kelembagaan Kementerian Agama memerlukan penguatan tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif dalam merespons dinamika sosial-politik dan keagamaan masyarakat Indonesia. Kolaborasi Penmad dan PAKIS tidak hanya bersifat koordinatif, tetapi juga integratif—keduanya saling melengkapi dalam menciptakan ruang pembelajaran sosial yang efektif bagi guru, siswa, dan masyarakat.

Event-Based Hidden Curriculum sebagai Mekanisme Internalisasi Nilai

Konsep *hidden curriculum* dalam pendidikan keagamaan telah banyak dikaji sebagai mekanisme internalisasi nilai secara implisit melalui kebiasaan, ritual, dan praktik sosial sehari-hari. Penelitian tentang *hidden curriculum* di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa kurikulum tersembunyi beroperasi melalui berbagai mekanisme, termasuk pengaturan waktu, ruang dan tubuh, moralisasi administratif, serta pembentukan humanistik. Temuan penelitian ini memperluas konsep tersebut dengan menunjukkan bahwa acara keagamaan berskala besar berfungsi sebagai *hidden curriculum* yang melampaui batas-batas institusi pendidikan formal.

Dalam rangkaian HAB ke-80, nilai-nilai moderasi beragama disisipkan secara implisit melalui simbol, ritus, dan praktik sosial. Disiplin birokrasi, loyalitas institusional, kerja sama lintas satuan pendidikan, serta interaksi lintas agama menjadi pengalaman kolektif yang dialami peserta tanpa disampaikan secara eksplisit sebagai materi ajar formal. Hal ini sejalan dengan penelitian tentang *school events* yang menunjukkan bahwa acara di sekolah berdampak pada internalisasi nilai moderasi beragama dan pembentukan karakter siswa.

Penelitian tentang implementasi moderasi beragama di sekolah umum juga menemukan bahwa *hidden curriculum* berperan penting dalam penguatan moderasi beragama melalui aktivitas sekolah dan pembiasaan nilai-nilai toleransi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa acara keagamaan birokratis seperti HAB merupakan arena strategis produksi nilai publik yang menjembatani dimensi internal (pembinaan guru dan siswa) dan eksternal (citra moderasi beragama Kementerian Agama di ruang publik).

Moderasi Beragama sebagai Narasi Publik dan Soft Power

Penelitian tentang *mainstreaming* moderasi beragama di Indonesia menunjukkan bahwa kampanye moderasi beragama tidak hanya ditujukan untuk konsumsi domestik, tetapi juga sebagai narasi publik dan *soft power* di tingkat nasional maupun global. Keberhasilan promosi moderasi beragama sangat ditentukan oleh konsistensi praktik institusional, keteladanan aktor negara, serta integrasi nilai moderasi ke dalam aktivitas rutin dan simbolik lembaga publik.

Dalam kerangka ini, acara keagamaan publik yang melibatkan simbol negara, ritus keagamaan, serta partisipasi kolektif memiliki keunggulan sebagai medium diseminasi nilai yang bersifat *experiential* dan *performatif*. Melalui keterlibatan langsung guru, siswa, dan masyarakat, nilai moderasi tidak hanya dikomunikasikan, tetapi dipraktikkan dan dinormalisasi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa moderasi beragama di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan harmoni sosial dan kebebasan beragama, sehingga pendekatan berbasis pengalaman dan praktik sosial menjadi semakin penting

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian *public value management* dengan menunjukkan bahwa nilai publik tidak hanya dihasilkan melalui kebijakan formal, tetapi juga melalui pengelolaan acara berbasis nilai (*value-oriented event management*). Temuan ini juga memperkaya literatur *hidden curriculum* dengan memperkenalkan konsep *event-based hidden curriculum* sebagai mekanisme internalisasi nilai yang melampaui batas-batas institusi pendidikan formal.

Secara praktis, penelitian ini menawarkan model pengelolaan acara keagamaan berbasis nilai yang dapat diadopsi oleh institusi publik lainnya. Keberhasilan Kemenag Pangandaran dalam mengorkestrasi Penmad dan PAKIS menunjukkan bahwa sinergi lintas unit kerja, ketika didukung oleh legitimasi kebijakan yang kuat dan kapasitas operasional yang memadai, dapat menghasilkan nilai publik yang berdampak luas. Acara keagamaan tidak lagi dipahami sebagai beban administratif, tetapi sebagai instrumen *collaborative governance* internal Kementerian Agama yang efektif dalam menormalkan nilai-nilai agama yang moderat di kalangan siswa, guru, dan masyarakat luas.

D. Conclusion

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa acara keagamaan birokratis, seperti rangkaian Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 di Kemenag Pangandaran, bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan instrumen strategis internalisasi moderasi beragama melalui mekanisme *event-based hidden curriculum*. Temuan menunjukkan bahwa orkestrasi kolaboratif antara Seksi Penmad dan PAKIS, yang didukung oleh legitimasi kebijakan (*authorising environment*) dan kapasitas operasional yang saling melengkapi, mampu menghasilkan nilai publik (*public value outcomes*) berupa penguatan sikap moderat, toleransi, dan kohesi sosial di kalangan guru, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, studi ini memperluas kerangka *Public Value Management* Moore ke ranah pendidikan keagamaan, sekaligus memperkaya teori *hidden curriculum* dengan menghadirkan perspektif baru bahwa acara berskala besar dapat menjadi wahana pembelajaran nilai yang melampaui batas kurikulum formal.

Secara praktis, model pengelolaan acara berbasis nilai ini menawarkan strategi bagi institusi publik lain untuk mengubah kegiatan rutin menjadi arena produksi nilai publik yang berdampak luas. Namun, karena penelitian ini terbatas pada satu lokasi dan jenis acara,

penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas jangka panjang dari internalisasi nilai melalui acara serupa di wilayah atau lembaga berbeda, serta mengeksplorasi variabel seperti persepsi peserta, peran kepemimpinan, dan pengaruh media digital dalam memperkuat diseminasi nilai moderasi. Pendekatan kuantitatif atau mix-method juga dapat digunakan untuk mengukur perubahan sikap secara lebih terukur, guna menyempurnakan model manajemen acara keagamaan yang adaptif dan berkelanjutan.

Bibliography

Bod, R. (2019). *Religious events, identity, and social cohesion: A sociological perspective*. [Publisher information not available].

Cerutti, S., & Piva, E. (2015). Religious tourism and event management: An opportunity for local tourism development. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 3(1), Article 8. [https://doi.org/10.21427/D76F0J\[reference:0\]](https://doi.org/10.21427/D76F0J[reference:0])

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dowson, R. (2017). Towards a definition of Christian mega-events in the 21st century. *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 5(3), Article 3.

Godinho, I. A. (2024). *Defining the success determinants for hosting a religious mega-event: Lessons from the "World Youth Day event"* [Master's thesis, Iscte - Instituto Universitário de Lisboa]. Repositório Iscte. [http://hdl.handle.net/10071/33345\[reference:3\]](http://hdl.handle.net/10071/33345[reference:3])

Ilmi, I., Dian, D., Basri, H., & Thohir, A. (2025). Event-Based Planning for Multicultural Education in Vocational High Schools: Evidence from Bakti Karya Parigi Pangandaran, Indonesia. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 11(02), 235-244.

Rani, N., Nurlita, S., & Hallimatusadiah, S. (2025). Peran kegiatan keagamaan dalam membentuk karakter religius dan memperkuat kebersamaan masyarakat desa cijurey. *Abdi Nusa: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 372-378.

Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.

Verma, A., Verma, M., Sarangi, P., Yadav, V., & M, M. (2021). Activity participation, episode duration and stop-making behavior of pilgrims in a religious event: An exploratory analysis. [Conference paper or journal article].